

PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA: SEBUAH PERCIKAN PEMIKIRAN

Agus Dwiyanto*

Abstract

The concept formulation of the development having population and family concepts aims at shifting the concept of population from a burden connotation into the development performer. The problems which are often seen in achieving the goal is among other thing: the existence of collision between the reinforcement of family functions with values and interests of other concept, such as economy. Agus Dwiyanto, in this writing tries to formulate a solution, i.e. the need of an integration between the concept of population, family and that of other development.

Pendahuluan

Kendati sudah cukup lama diperkenalkan inplementasi pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga, hingga saat ini hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai masalah dan kendala, baik yang bersifat konseptual, kelembagaan, maupun informasi menjadi kendala utama dari pelaksanaan konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga.

Artikel ini mencoba menjelaskan berbagai kesulitan dalam merumuskan konsep wawasan penduduk dan keluarga, terutama dalam mengintegrasikannya dengan wawasan-wawasan pembangunan lainnya, yang sering saling bertentangan. Berbagai masalah kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga juga

dibicarakan dalam artikel ini. Akhirnya, tulisan ini berusaha menawarkan beberapa pilihan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga.

Integrasi Kependudukan dan Keluarga dalam Pembangunan Nasional

Keinginan untuk mengembangkan pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga menjadi semakin kuat dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan pemerintah mengenai pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera. Dengan adanya UU No X Tahun 1992, yang kemudian diikuti dengan PP No. 21 dan PP No. 27, pemerintah memiliki

* Dr. Agus Dwiyanto adalah kepala Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar Fakultas ISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

landasan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera. Bahkan, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 1996 (dan kemudian diikuti dengan Kepres) yang secara khusus mengatur pembiayaan pembangunan keluarga sejahtera. Ini semuanya menunjukkan betapa besarnya perhatian pemerintah mengenai perlunya penanganan yang sungguh-sungguh terhadap masalah kependudukan, kesejahteraan keluarga, dan kemiskinan.

Untuk mendorong proses pembangunan yang tanggap terhadap isu dan masalah kependudukan dan keluarga, pemerintah menggulirkan konsep pembangunan yang berwawasan pembangunan dan keluarga (Suyono, 1996). Konsep pembangunan ini menempatkan tujuan pembangunan kependudukan dan penguatan fungsi-fungsi keluarga sebagai suatu nilai yang harus diwujudkan dalam pembangunan. Pembangunan bukan hanya dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat semata-mata, melainkan diharapkan juga dapat memberikan implikasi positif terhadap upaya pengendalian fertilitas, mobilitas, dan perbaikan kualitas penduduk. Lebih dari itu, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan harus memiliki kontribusi positif terhadap penguatan peran dan fungsi keluarga. Secara ringkas, konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga menempatkan aspek-aspek perubahan penduduk dan efektivitas fungsi keluarga sebagai variabel penting dalam pengambilan keputusan pembangunan. Keduanya, variabel-

variabel kependudukan dan keluarga, memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan, baik sebagai *input* maupun sebagai *output* dari pembangunan sosial ekonomi.

Kendati demikian, sejauh ini pengembangan konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan. Perhatian para perencana dan pengambil kebijakan pembangunan, baik di pusat maupun daerah, terhadap isu dan masalah kependudukan dan keluarga masih amat rendah. Karenanya, tidaklah mengherankan kalau banyak pelaksanaan program-program pembangunan selama ini yang mengabaikan dampaknya terhadap perubahan penduduk dan penguatan peran keluarga. Variabel kependudukan dan keluarga masih memiliki posisi yang amat marginal dalam perencanaan pembangunan. Upaya untuk mengintegrasikan variabel kependudukan dan keluarga dalam pembangunan karenanya masih mengalami banyak kesulitan.

Kesulitan utama dalam mengintegrasikan variabel kependudukan dan keluarga dalam pembangunan nasional muncul dari kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi antara wawasan penduduk dan keluarga dengan pembangunan ekonomi, yang selama ini masih mendominasi pembangunan di Indonesia. Ini terjadi karena wawasan penduduk dan keluarga tidak selalu berjalan bersama dengan wawasan ekonomi dan wawasan-wawasan pembangunan lainnya, bahkan, wawasan-wawasan tersebut saling berbenturan satu sama lainnya. Nilai-nilai yang dituntut untuk

pengembangan wawasan penduduk dan keluarga mungkin berbenturan dengan ekonomi dan atau sebaliknya. Situasi seperti ini tentunya mempersulit pengembangan konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga.

Pada tingkat yang lebih operasional, benturan nilai antara pertumbuhan ekonomi, kependudukan, dan keluarga bisa diamati dari adanya *trade-off* yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan. Suatu pilihan kebijakan pembangunan seringkali menghasilkan konsekuensi yang berbeda dilihat dari ketiga dimensi itu. Apa yang menguntungkan dilihat dari pertimbangan pertumbuhan dan efisiensi ekonomi, belum tentu memiliki nilai yang serupa dilihat dari dimensi-dimensi lainnya, termasuk dari dimensi penduduk dan keluarga. Bahkan, seringkali pelaksanaan suatu kebijakan pembangunan memiliki *conflicting impacts* dilihat dari ketiga dimensi itu. Suatu keputusan untuk melakukan investasi di Jawa, misalnya, mungkin akan menguntungkan dilihat dari pertimbangan efisiensi ekonomi mengingat pertimbangan pasar, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia, tetapi jelas tidak menguntungkan dilihat dari keinginan untuk merangsang mobilitas penduduk ke luar Jawa. Akses terhadap pasar kerja yang lebih besar bagi perempuan tentunya memiliki nilai yang positif bagi pengendalian fertilitas dan efisiensi ekonomi, tetapi seringkali dilihat kurang menguntungkan dari sisi penguatan fungsi-fungsi keluarga. Hal-hal semacam ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kita bisa

melakukan rekonsiliasi antara nilai-nilai yang seringkali berbenturan antara kependudukan, keluarga dengan dimensi-dimensi pembangunan lainnya. Atau, mungkin pertanyaannya adalah apakah mungkin kita melakukan rekonsiliasi dan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan kependudukan dan keluarga dalam pembangunan sosial ekonomi?

Untuk bisa melakukan rekonsiliasi dan integrasi kependudukan dan keluarga dalam pembangunan sosial ekonomi, tentunya pertama-tama harus diperjelas visi atau wawasan pembangunan nasional yang dikehendaki. GBHN 1993 secara tegas menyatakan bahwa pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan ekonomi seiring dengan pengembangan sumber daya manusia. Wawasan pembangunan ekonomi yang selama ini dikembangkan kiranya cukup jelas; peningkatan efisiensi ekonomi termasuk pengembangan industri yang efisien dan berdaya saing menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi nasional. Menghadapi tantangan abad 21 yang dicirikan dengan liberalisasi pasar dan persaingan global yang lebih ketat, maka peningkatan efisiensi dan daya saing menjadi isu pembangunan ekonomi yang utama. Pertanyaannya sekarang adalah apa visi kependudukan dan keluarga yang akan perlu dikembangkan untuk menghadapi abad 21? Apakah visi kependudukan dan keluarga itu bisa diintegrasikan dengan visi pembangunan lainnya, utamanya ekonomi dan pengembangan SDM? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentunya amat penting untuk diperhatikan dalam mengembangkan

konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga.

Mengingat orientasi pada pertumbuhan ekonomi cenderung menjadi nilai yang dominan dalam kebijakan pembangunan di Indonesia selama ini maka konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga cenderung ditempatkan sebagai subordinat dari pembangunan ekonomi. Akibatnya, bisa diduga, visi kependudukan dan keluarga yang dikembangkan cenderung terseleksi pada visi tertentu, yaitu visi yang cocok dengan kepentingan dan nilai yang terkandung dalam pembangunan ekonomi. Wawasan penduduk dan keluarga yang dapat diintegrasikan hanyalah wawasan yang memberi dukungan pada pembangunan ekonomi sehingga wawasan penduduk dan keluarga gagal menjadi filter bagi munculnya ekseksek pembangunan yang merugikan dilihat dari "tujuan pembangunan kependudukan dan keluarga".

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya subordinasi dari wawasan penduduk dan keluarga dalam proses pembangunan, Kantor Menteri Negara Kependudukan sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini, perlu segera merumuskan dengan jelas konsepsinya mengenai "pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga". Kendatipun konsep ini sudah cukup lama dikembangkan, bahkan sejak Kantor Meneg KLH, konsep pembangunan berwawasan penduduk sejauh ini masih sangat kabur. Oleh karena itu, adalah sangat wajar kalau wawasan penduduk dan keluarga kurang mendapat tempat yang wajar dalam proses perencanaan dan

pengambilan keputusan pembangunan.

Perumusan konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga hanya dapat dirumuskan kalau kita punya wawasan atau visi yang jelas mengenai pembangunan kependudukan dan keluarga pada masa depan. Pergeseran wawasan mengenai penduduk dari sebagai *beban* menjadi sebagai *pelaku pembangunan*, seperti yang disampaikan Menteri Negara Kependudukan beberapa waktu lalu, perlu diikuti dengan kebijakan dan program-program aksi yang jelas dan konsisten. Dilihat dari tantangan masa depan yang dihadapi oleh Indonesia pada abad 21 (Dwiyanto, 1996), yang kuantitas dan daya saing penduduk dan SDM-nya memiliki peran yang kritis dalam kelangsungan pembangunan, maka pergeseran wawasan mengenai penduduk tersebut tentunya merupakan tindakan yang amat tepat. Wawasan penduduk sebagai pelaku pembangunan tentunya juga amat cocok dengan wawasan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan SDM. Dengan mengembangkan wawasan penduduk sebagai pelaku pembangunan, mungkin kita akan dapat mengembangkan kebijakan dan program penduduk yang bisa memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dan SDM melalui peningkatan kualitas pelaku pembangunan. Lebih dari itu, wawasan tersebut bisa juga mengarahkan kegiatan pembangunan ekonomi dan SDM agar kegiatan pembangunan ekonomi dan SDM juga memiliki implikasi yang positif terhadap pembangunan kependudukan

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan wawasan keluarga? Apa wawasan keluarga yang perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan masa depan? Dalam PP No. 21 dan PP No. 27 dijelaskan bahwa keluarga memiliki delapan fungsi yang penting: keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Dengan melihat fungsi keluarga ini, pembangunan berwawasan keluarga bisa didefinisikan sebagai pembangunan yang dilakukan dengan tidak merusak peran dan fungsi keluarga. Pembangunan bisa dikatakan berwawasan keluarga kalau proses perencanaan dan pelaksanaannya memperhatikan peran dan fungsi keluarga, dan konsekuensi dari pembangunan itu punya makna positif bagi penguatan fungsi-fungsi keluarga.

Persoalan akan muncul kalau penguatan fungsi-fungsi keluarga itu berbenturan dengan nilai dan kepentingan dari wawasan lainnya, seperti ekonomi dan bahkan, dengan wawasan penduduk. Kendati wawasan keluarga tidak selalu berbenturan dengan wawasan lainnya, benturan antarwawasan bukan tidak mungkin terjadi. Kalau kita kembali pada konsensus nasional, seperti yang terkandung dalam GBHN, wawasan keluarga yang perlu dikembangkan tentunya adalah yang bisa mendukung pembangunan ekonomi dan SDM. Dengan melihat fungsi-fungsi keluarga di atas, pertanyaannya sekarang ialah apa fungsi-fungsi keluarga yang bisa mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan SDM? Mana di antara

fungsi-fungsi keluarga itu yang bisa menjadikan keluarga sebagai wahana pembangunan ekonomi dan SDM? Kalau kita bisa menjadikan keluarga sebagai wahana pembangunan ekonomi dan SDM, integrasi wawasan keluarga dalam pembangunan bisa dilakukan secara lebih optimal.

Jadi, integrasi wawasan penduduk dan keluarga dalam pembangunan nasional dapat dilakukan tanpa harus menempatkannya sebagai subordinat dari pembangunan ekonomi, kalau kita bisa menempatkan wawasan penduduk dan keluarga itu dalam konteks pengembangan SDM. Amanat GBHN yang mengatakan bahwa orientasi pembangunan pada pembangunan ekonomi *seiring* dengan SDM secara eksplisit menunjukkan komitmen pemerintah untuk menempatkan pengembangan SDM sama pentingnya dari pembangunan ekonomi. Kata *seiring* sengaja dipilih untuk mengingatkan pentingnya pengembangan SDM memperoleh perhatian yang sama besarnya dari pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, wawasan ekonomi mestinya tidak boleh lagi mendominasi proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus juga memberikan perhatian yang sama pada pengembangan SDM. Berdasar atas logika ini wawasan penduduk dan keluarga mestinya harus memiliki kedudukan yang sama dengan wawasan pembangunan ekonomi kalau wawasan itu memiliki implikasi yang besar terhadap pengembangan SDM.

Fragmentasi Birokrasi dan Agen Perencana

Ketidajelasan konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga, seperti dijelaskan sebelumnya, merupakan kendala utama dari pelembagaan pada konsep pembangunan itu sendiri. Namun, seandainya "wawasan penduduk dan keluarga" bisa dirumuskan dengan jelas dan rekonsiliasinya dengan wawasan pembangunan lainnya bisa dilakukan, apakah pelembagaan dari konsep pembangunan ini akan dapat dengan mudah dilakukan? Adakah kendala-kendala yang perlu dicermati agar upaya untuk melembagakan pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga dapat berjalan dengan baik?

Satu kendala yang mungkin perlu diperhatikan dalam pelembagaan pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga adalah tingginya fragmentasi birokrasi dan agen perencana pembangunan. Ini dapat dilihat dari terkotak-kotaknya birokrasi dan agen perencana dalam begitu banyak departemen dan lembaga non-departemen, yang seringkali mengembangkan wawasannya sendiri yang sempit mengenai pembangunan. Dalam situasi ketika wawasan pembangunan nasional masih amat lemah maka ada kecenderungan setiap departemen dan lembaga untuk mengembangkan wawasannya sendiri mengenai pembangunan. Setiap departemen cenderung mengembangkan persepsinya sendiri mengenai pembangunan sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di departemen dan birokrasinya.

Wawasan yang dikembangkan oleh setiap departemen dan lembaga ini tentunya akan sangat mempengaruhi perencanaan program dan kebijakan di departemennya masing-masing. Agen perencana di setiap departemen kemudian cenderung mengembangkan program dan kegiatan yang mengabdikan pada kepentingan departemennya masing-masing dan kurang memperhatikan kepentingan departemen lainnya, atau bahkan kepentingan pembangunan nasional secara keseluruhan. Berkembangnya ego sektoral semacam ini tentunya akan mempersulit pengembangan konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga. Pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga cenderung dilihat sebagai kepentingan dari Kantor Menteri Negara Kependudukan dan BKKBN semata-mata. Karenanya, nilai dan tujuan yang terkandung dalam pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga menjadi amat sulit diwujudkan dalam perencanaan program dan kegiatan di setiap departemen lain.

Ego sektoral cenderung berkembang, di samping karena fragmentasi birokrasi, juga karena lemahnya kemampuan Bappeda dan Bappenas dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bappeda seringkali sangat sulit dalam mengarahkan kegiatan pembangunan dari berbagai departemen dan lembaga yang ada di daerah agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam situasi seperti ini tentu amat sulit mengharap-kan Bappeda bisa berperan secara optimal dalam pengembangan

pembangunan daerah yang berwawasan penduduk dan keluarga. Disamping karena pengaruh sektoral yang amat kuat, kesulitan itu juga muncul dari kurangnya pemahaman para perencana di Bappeda mengenai konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga. Lebih dari itu, kemampuan para perencana di daerah, baik dari Bappeda dan sektoral, dalam memproduksi dan memanfaatkan informasi kependudukan seringkali masih amat terbatas. Karenanya, dapat dipahami kalau implementasi dari konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga masih amat terbatas.

Kondisi di atas masih diperparah oleh terbatasnya informasi yang tersedia mengenai hubungan antara kependudukan dan efektivitas fungsi keluarga dengan kegiatan pembangunan sosial ekonomi. Pada tingkat nasional informasi mengenai hubungan antara kependudukan dan pembangunan sosial ekonomi barangkali sudah cukup banyak tersedia. Namun, pada tingkat daerah informasi kependudukan, seperti struktur dan karakteristik penduduk dan hubungannya dengan pembangunan sosial ekonomi seringkali masih amat terbatas. Apalagi kalau kita berbicara mengenai informasi hubungan antara efektivitas fungsi-fungsi keluarga dengan kependudukan dan pembangunan sosial ekonomi, ketersediaan dan akses terhadap informasi semacam ini masih amat sangat terbatas. Pada tingkat daerah situasinya tentu jauh lebih parah. Keterbatasan informasi ini tentunya juga menjadi salah satu faktor penting yang menghambat pengembangan

konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga.

Melihat berbagai kendala di atas maka pelembagaan konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga masih memerlukan perjuangan yang amat panjang. Pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga masih lebih merupakan harapan daripada kenyataan. Untuk itu, berbagai upaya pengembangan, baik yang bersifat konseptual maupun kelembagaan perlu terus dilakukan.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Dengan melihat berbagai kendala di atas, pelembagaan pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga hanya akan dapat dilaksanakan secara optimal kalau bisa diperjelas konsepsi kita mengenai wawasan penduduk dan keluarga, serta menempatkannya dalam konteks pembangunan ekonomi dan pengembangan SDM. Untuk itu, inisiasi yang dilakukan oleh Kantor Menteri Kependudukan untuk melakukan serangkaian kajian pengembangan konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga ini merupakan langkah yang positif untuk memperjelas dan sekaligus menyosialisasikan konsep pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga. Namun, tentunya langkah ini perlu diikuti dengan tindakan-tindakan lain yang lebih nyata dari Kantor Menteri Kependudukan, antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan kajian mengenai interaksi dan kaitan antara wawasan penduduk dan keluarga dengan wawasan-wawasan pembangunan lainnya, terutama

dengan pembangunan ekonomi dan SDM, yang sementara ini menjadi fokus dari pembangunan nasional. Kajian-kajian seperti ini penting dalam rangka memperbanyak informasi mengenai hubungan antara pembangunan, baik sektoral maupun daerah, dengan isu dan masalah kependudukan dan keluarga, yang sejauh ini masih amat terbatas. Di samping melakukan kajian, tentunya yang lebih penting untuk diperhatikan adalah pemanfaatan informasi mengenai penduduk dan keluarga, terutama oleh para perencana dan pembuat kebijakan. Sejalur ini pemanfaatan hasil kajian dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga oleh para perencana masih amat terbatas. Oleh karena itu, pengembangan SIDUGA yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan para perencana dan pembuat kebijakan, sektoral dan daerah, perlu memperoleh perhatian yang besar dari Kantor Menteri Kependudukan.

2. Mengembangkan analisis dampak kependudukan dan keluarga. Upaya untuk mengembangkan analisis dampak kependudukan sudah lama dilakukan, namun sejauh ini belum banyak memberikan hasil yang jelas, baik mengenai substansi maupun metodologinya. Upaya yang sama dapat dilakukan untuk mengembangkan analisis dampak keluarga. Melalui cara ini dampak pembangunan terhadap penduduk dan keluarga akan dapat dipahami dengan baik sehingga memudah-

kan para perencana dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan mengenai program dan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan. Melalui cara ini pula mungkin kita bisa mengembangkan sistem pemantauan interaksi antara pembangunan, kependudukan, dan keluarga.

3. Melakukan lokakarya dan pelatihan mengenai analisis demografi pada para perencana daerah dan sektoral, setidak-tidaknya untuk membuat mereka mampu memanfaatkan informasi kependudukan dalam proses perencanaan dan perumusan program pembangunan. Melalui kegiatan seperti ini, sensitivitas para perencana dan pembuat kebijakan terhadap isu dan masalah kependudukan, termasuk dampak kependudukan dan keluarga dari program dan proyek pembangunan dapat ditingkatkan.
4. Mendorong pengembangan berbagai institusi dan regulasi yang mampu memperkuat peran penduduk dan fungsi-fungsi keluarga. Meningkatkan peranserta perempuan dalam sektor publik mestinya harus diikuti dengan pengembangan berbagai institusi dalam masyarakat yang mungkin bisa memperkuat keluarga dalam segala fungsinya seperti pendidikan, agama, budaya, kasih sayang, dsb. Institusi-institusi seperti tempat penitipan anak (TPA), sekolah pra-TK, asosiasi sukarela yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga perlu terus dikembangkan dan memperoleh perhatian yang wajar dari pemerintah. Lebih dari

itu, pemerintah juga perlu mengembangkan berbagai institusi (serikat pekerja dan LSM) dan regulasi yang melindungi peran dan hak-hak penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, dan keluarga dalam kegiatan ekonomi. Regulasi yang melindungi fungsi keluarga, seperti fungsi reproduksi dsb, terutama bagi para pekerja perempuan perlu dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif.

Di samping beberapa hal di atas, tentunya masih banyak yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembangunan yang berwawasan penduduk dan keluarga. Apa yang disampaikan dalam tulisan ini hanyalah sekelumit pemikiran yang barangkali bisa menambah wawasan kita dan menjadi bahan diskusi untuk pengembangan pembangunan yang berwawasan penduduk dan keluarga.

Referensi

- Dwiyanto, Agus, 1996. "Meeting challenges of the 21st century: a shift from fertility control to quality-oriented population and HRD policies", disampaikan dalam *Diskusi panel Indonesian Update 1996*, di Australian National University, Canberra.
- Suyono, Haryono, 1996. "Pokok-pokok uraian tentang pembangunan

berwawasan kependudukan", disampaikan pada *Kuliah Perdana Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada*, 2 September 1996.

United Nations. Department of International Economic and Social Affairs. 1993. *Population and Development Planning*. New York.